

DAMPAK KORUPSI PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK TERHADAP KEBERLANGSUNGAN BUMN DAN MASYARAKAT INDONESIA

Nurmia Azzahra¹, Virginia Alanus², Luhur Athallah³

Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia
E-mail: nurmia.azzahra05@gmail.com ; alanvirginia46@gmail.com ; luhurathallah90@gmail.com

Abstrak

BUMN Waskita Karya (Persero) kerap menjadi pusat dalam pengerjaan proyek-proyek infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun ironisnya, kasus korupsi yang melibatkan BUMN Waskita Karya (Persero) seringkali menimbulkan dampak negatif. Korupsi dalam pengelolaan proyek, pengadaan proyek, atau pemanfaatan sumber daya sering kali mengalami kerugian keuangan negara yang substansial. Dampak dari kasus korupsi di BUMN Waskita Karya (Persero) juga bisa terlihat dalam ketidakmerataan distribusi sumber daya dan kualitas layanan publik. Proyek yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat malah terhambat, tertunda, atau bahkan tidak diselesaikan karena penyalahgunaan kekuasaan atau uang. Dengan adanya kasus korupsi ini bagaimana dengan kerugian-kerugian yang ditimbulkan, bagaimana pengaruhnya terhadap anggaran, bagaimana korupsi ini mempengaruhi masyarakat dan bagaimana korupsi ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Dengan kasus korupsi Waskita Karya (Persero) ini kita melakukan pendekatan dengan metode kualitatif deskriptif dan mencari solusi yang tepat untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi atas kasus korupsi ini. Dengan ini hasil yang dicapai adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan Destiawan Soewardjono, menetapkan Direktur Utama PT Waskita Karya, sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank oleh PT Waskita Karya dan PT Waskita Beton Precast.

Kata Kunci: BUMN Karya ; Dampak ; Korupsi

Pendahuluan

Dalam era ini, isu korupsi di Indonesia terus menjadi sorotan utama di kalangan masyarakat, terutama melalui berbagai media baik lokal maupun nasional. Tindakan korupsi di Indonesia sudah menjadi suatu kebiasaan dan dianggap sebagai budaya yang sering dilakukan oleh berbagai pihak dan menjadi salah satu pemicu keterpurukan sistem ekonomi Indonesia dan menyebabkan kerugian keuangan negara serta melanggar hak masyarakat. Banyak pakar dan individu dari berbagai latar belakang mengemukakan pandangan mereka mengenai permasalahan korupsi ini. Korupsi menurut Brooks adalah tindakan yang sengaja dilakukan atas dasar kesalahan atau kelalaian melakukan tugas yang diketahuinya sebagai suatu kewajiban. Sehingga tindakan ini merujuk pada sesuatu yang tidak menguntungkan dan cenderung bersifat pribadi. Menurut Robert Klitgaard, Korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatan di suatu negara. Tindakan tersebut termasuk hal yang memperoleh keuntungan, status, dan uang untuk diri pribadi dan melanggar aturan pelaksanaan yang ada. Meskipun ada kesamaan dalam beberapa pandangan, namun seringkali terdapat perbedaan yang signifikan di antara mereka. Meskipun demikian, satu hal yang tidak dapat disangkal adalah bahwa korupsi memiliki dampak merugikan bagi negara dan dapat mengancam fondasi kehidupan bersama dalam masyarakat.

Kasus korupsi yang melibatkan BUMN Karya (biasanya merujuk pada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Holding BUMN Karya, seperti PT Waskita Karya, PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, dan PT Pembangunan Perumahan) seringkali terkait dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan, penggelapan, atau tindakan korupsi lainnya yang melibatkan pejabat atau pihak terkait di dalamnya. Pada kasus ini dapat kita lihat dengan adanya tindakan korupsi pada PT Waskita Karya (Persero), yang merupakan salah satu bagian dari Badan Usaha Milik Negara yang berfokus pada bidang jasa konstruksi terkait dengan pembangunan infrastruktur publik.

Kejadian di PT Waskita Karya (Persero) dimulai ketika timbul dugaan tindak korupsi yang melibatkan Direktur Utama perusahaan, Destiawan Soewardjono. Destiawan menjadi tersangka dalam kasus yang menyangkut penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang terkait dengan Waskita Karya dan anak perusahaannya, PT Waskita Beton Precast. Namun sebelum adanya dugaan korupsi ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menemukan beberapa permasalahan dalam kegiatan investasi terkait proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero) dan anak perusahaannya. Kronologi suatu kasus korupsi PT Waskita Karya bisa sangat bervariasi, dan setiap kasus memiliki fakta dan peristiwa spesifik yang mengarah ke investigasi dan pengadilan. Namun, terkadang kasus-kasus ini melibatkan proses korupsi yang meluas dari praktik suap, markup proyek, penyelewengan dana, hingga penyalahgunaan kekuasaan dan posisi strategis. Terdapat beberapa permasalahan internal yang terus muncul dengan mengatasnamakan PT Waskita Karya (Persero) dan menimbulkan berbagai kerugian salah satunya seperti utang proyek infrastruktur akibat adanya jatuh tempo untuk melunasi bunga obligasi sebesar Rp 4,7 triliun.

Adanya permasalahan ini semakin bertambah dengan munculnya kasus korupsi yang dilakukan oleh para petinggi Waskita Karya sebelum ditetapkannya Destiawan sebagai tersangka pada tahun 2023. Pada akhir tahun 2022 beberapa direktur dan staf ahli dari PT Waskita Karya (Persero) juga telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi Waskita Karya. Kasus ini merupakan salah satu tindakan korupsi yang dilakukan secara massal oleh beberapa mantan direktur dan memiliki peran masing-masing dalam merealisasikan tindakan ini. Para direktur tersebut melakukan penyimpangan dengan memberikan perintah untuk melakukan penyetujuan pencairan dana *supply chain financing* (SCF) dengan penggunaan dan penyediaan dokumen palsu sebagai pendukung dari tindakan tersebut. Adanya dokumen palsu akan digunakan untuk melakukan pencairan SCF untuk membayar utang-utang dari PT Waskita Karya (Persero) dimana hal tersebut diakibatkan karena membiayai proyek fiktif yang dilakukan oleh para tersangka. Kerugian negara pada tahun 2020 yang disebabkan karena adanya kasus ini terhitung oleh BPKP sebesar Rp202,296 miliar disertai dengan pembuatan 14 kontrak fiktif. Sementara sejak saat ini diduga kerugian yang ditimbulkan oleh kasus tersebut telah mencapai Rp 3 Triliun Rupiah.

Munculnya kasus korupsi PT Waskita Karya memberikan berbagai dampak bagi keberlangsungan segala sektor yang terkait. Dalam hal ini, analisis mengenai dampak korupsi di PT Waskita Karya (Persero) bisa dimulai dengan menggarisbawahi peran penting Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Dampak dari kasus korupsi di PT Waskita Karya (Persero) juga bisa terlihat dalam ketidakseimbangan distribusi sumber daya dan kualitas layanan publik. Proyek-proyek yang seharusnya memberikan manfaat kepada masyarakat dapat terhambat, terlambat, atau bahkan tidak selesai karena penyalahgunaan kekuasaan dan dana. Selain itu, korupsi yang terjadi pada PT Waskita Karya (Persero) juga menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan negara dan korporasi yang seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan. Hal ini bisa merusak kepercayaan publik serta menurunkan moral dan semangat untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara. Selain itu, pembahasan mengenai dampak korupsi di PT Waskita Karya (Persero) juga menggarisbawahi bahwa masalah ini bukan hanya sekadar soal keuangan atau administratif, tetapi juga soal kepercayaan, kualitas layanan publik, dan keadilan sosial. Perlu upaya yang serius dan terarah untuk mencegah serta menangani dampak negatif yang ditimbulkan oleh korupsi di sektor-sektor penting seperti PT Waskita Karya (Persero).

Tinjauan Pustaka

Integritas

Integritas merupakan sebuah bentuk keteguhan diri seseorang untuk menghindari berbagai macam tindakan yang dapat menimbulkan adanya perilaku mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan orang lain yang lebih berhak (Gea, 2014). Menurut (Lestari dan Supadmi, 2017) integritas dalam pelayanan publik merupakan sebuah komitmen oleh pemerintah untuk melakukan peningkatan layanan publik bagi masyarakat untuk mewujudkan governance yang lebih baik. Integritas diperlukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat sesuai dengan kepercayaan publik. Selain itu menurut (Sukriah dan Inapty, 2009) seseorang yang mempunyai integritas harus memiliki karakter jujur, transparan dan berani bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa integritas sangat penting untuk dimiliki guna menahan segala bentuk perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain serta berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Integritas memiliki peran utama dalam mencegah dan mengatasi korupsi di segala tingkatan masyarakat dan perusahaan. Keterkaitan yang erat antara integritas dan pencegahan korupsi tidak hanya mencerminkan aspek moral dan etika, tetapi juga memiliki dampak besar pada keberlanjutan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Negara-negara dengan budaya integritas yang kuat cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, investasi yang lebih besar, dan keadilan sosial yang lebih baik. Pentingnya integritas sebagai benteng pertahanan terhadap tindakan korupsi terlihat dalam kemampuannya untuk membentuk perilaku yang jujur, adil, dan transparan. Ketika individu, organisasi, dan pemerintah mengutamakan integritas, mereka menciptakan budaya dimana korupsi sulit berkembang serta menciptakan landasan kuat bagi kepercayaan dan keadilan untuk mengurangi peluang terjadinya tindakan korupsi yang merugikan. Di tingkat perusahaan, integritas adalah fondasi tata kelola yang baik, dimana kebijakan dan praktik yang didasarkan pada integritas memberikan landasan yang kokoh untuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dengan memastikan bahwa keputusan dan tindakan didasarkan pada nilai-nilai integritas, perusahaan-perusahaan dapat membentuk lingkungan di mana korupsi tidak dapat berkembang.

Korupsi

Secara etimologis, kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin "corruptio" yang berarti kerusakan atau perusakan. Dalam konteks bahasa, pengertian korupsi dapat merujuk pada suatu perubahan yang merusak, baik secara moral maupun fisik. Korupsi dinilai sebagai sebuah perilaku tidak bermoral yang berkaitan dengan kegiatan penerimaan suap hingga penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan memberikan kerugian terhadap orang lain (Ali, 1993). Dalam teori *willingness and opportunity to corrupt* dikatakan bahwa tindakan korupsi ini umum terjadi ketika terdapat kesempatan seperti kurangnya sistem pengawasan dan disertai dengan niat buruk yang didorong oleh keserakahan terhadap suatu hal tanpa mementingkan orang lain. Menurut (Hopkin, 1997) terjadinya korupsi pada sektor publik mempunyai hubungan dengan kepemimpinan politik, dimana korupsi ini umumnya terjadi pada tingkatan tertinggi kekuasaan yang dimiliki oleh seorang politisi yang berdampak pada kerugian negara. Tingkat korupsi pada negara berkembang seperti Indonesia, dinilai lebih parah jika dibandingkan dengan tingkat korupsi pada negara maju (Tanzi, 1998). Hal ini dikarenakan pada negara berkembang terdapat kebebasan bagi para pejabat publik dan minimnya sistem pengawasan yang baik terhadap setiap kegiatan yang mereka lakukan. Adanya hal tersebut menyebabkan semakin terbuka lebarnya kesempatan korupsi bagi para pejabat

publik dikarenakan lemahnya penegakan hukum, dan tidak memberikan efek jera meskipun dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan sudut pandang hukum, suatu tindakan dapat dinilai sebagai perilaku korupsi jika memenuhi unsur-unsur seperti: tindakan yang berlawanan dengan hukum yang berlaku, adanya penyalahgunaan kekuasaan, serta terdapatnya upaya penyalahgunaan sarana public untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun sekelompok tertentu.

Dampak Korupsi

Terjadinya tindakan korupsi dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Tindakan korupsi seperti melakukan penyuapan maupun penggelapan dana untuk kepentingan pribadi dapat mempengaruhi besaran pengeluaran layanan publik dan akan memberikan kerugian bagi masyarakat yang bergantung pada pemerintah seperti, masyarakat dengan golongan ekonomi rendah (Wong, 2017). Dampak korupsi bagi pemerintah dan masyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek salah satunya aspek ekonomi dan sosial. Korupsi memberikan dampak yang signifikan terhadap aspek ekonomi yang berperan sebagai faktor utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut (Mauro, 2011) tindakan korupsi memberikan relevansi negatif terhadap kemajuan ekonomi suatu negara, dimana adanya korupsi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi serta pendapatan dan pengeluaran publik yang berguna untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu korupsi juga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat, yang berpengaruh terhadap meningkatnya harga kebutuhan pokok mereka dan sistem pelayanan publik yang disediakan pemerintah. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai kerugian yang harus diselesaikan oleh pemerintah untuk menanggung akibat ekonomi yang diakibatkan oleh tindakan korupsi. Tindakan tersebut akan menyebabkan munculnya ketimpangan pendapatan yang dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi dan memperburuk tingkat kemiskinan masyarakat dan angka kriminalitas. Terjadinya tindakan korupsi juga akan menyebabkan semakin berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, karena adanya korupsi yang menghalangi tata kelola pemerintahan.

Metode

Dalam penulisan ini, kami menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif menurut (Moleong, 2007) adalah pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan lapangan yang kemudian menghasilkan data deskriptif untuk mendapatkan informasi secara mendalam dan menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi secara lebih jelas. Sementara pendekatan deskriptif menurut (Nana Sudjana dan Ibrahim) mengatakan bahwa pada pendekatan ini akan lebih memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual yang kemudian akan digambarkan dan dideskripsikan secara mendalam dan terperinci. Dalam pendekatan kualitatif deskriptif ini didasarkan pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dari studi literatur terkait. Data ini diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan isu penulisan. Dengan menggunakan data ini, bertujuan untuk menyusun dan menguraikan informasi yang signifikan, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang mendalam dan menyeluruh mengenai permasalahan dalam topik penulisan ini.

Hasil dan Pembahasan

Kasus korupsi dapat dilihat dalam berbagai bentuk dan memiliki dampak yang bervariasi terhadap keberlangsungan ekonomi suatu negara maupun kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dampak dari kasus korupsi ini sangat signifikan, terutama bagi PT Waskita Karya

(Persero), yang merupakan salah satu BUMN konstruksi terbesar di Indonesia. Kasus ini berpotensi menyebabkan dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan, Dampak terhadap permasalahan hukum Perseroan, Dampak terhadap kegiatan operasional Perseroan, Dampak terhadap kondisi keuangan Perseroan, dan Dampak bagi masyarakat. Namun, perlu dicatat dan dipastikan bahwa Perseroan menegaskan bahwa permasalahan hukum ini adalah tindakan dari oknum yang bersangkutan, dan tidak ada keterlibatan dari pihak Perseroan. Dampak bagi Perseroan akibat permasalahan hukum tersebut, antara lain:

1. Dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan

Perseroan BUMN Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) menghadapi dampak yang signifikan, menciptakan tantangan serius bagi kelangsungan usahanya. Krisis likuiditas yang muncul akibat pembatalan PMN senilai Rp3 triliun menjadi ancaman yang memerlukan perhatian serius terhadap daya tahan perusahaan. Evaluasi menyeluruh oleh Kementerian Keuangan menunjukkan perlunya perhatian mendalam terhadap kondisi keuangan Waskita Karya. Selain itu, penurunan harga saham sebagai hasil dari rencana *rights issue* juga menjadi perhatian serius, terutama dengan harga saham yang jauh di bawah kisaran yang ditetapkan oleh Komite Privatisasi, berpotensi membahayakan kelangsungan jangka panjang perusahaan. Pembatalan PMN Rp3 triliun oleh pemerintah dari alokasi APBN 2022 semakin mempersulit rencana kerja perseroan, menghadirkan potensi dampak yang signifikan pada sumber daya yang dibutuhkan untuk proyek-proyek dan operasional sehari-hari. Tak kalah penting, dampak dari kasus korupsi yang melibatkan mantan direksi Waskita Karya juga membayangi kelangsungan usaha perusahaan. Walaupun manajemen menegaskan bahwa kasus tersebut tidak langsung memengaruhi operasional dan keuangan, reputasi perseroan berisiko turun di mata pemangku kepentingan. Sebagai tanggapan, upaya serius untuk perbaikan dan restrukturisasi mungkin perlu diambil oleh Waskita Karya. Langkah-langkah ini menjadi kunci dalam memulihkan kondisi keuangan, meningkatkan harga saham, mencari opsi pembiayaan alternatif, dan memulihkan kepercayaan pemangku kepentingan. Dengan demikian, inisiatif ini menjadi kunci dalam menjaga kelangsungan usaha perseroan di tengah cobaan yang dihadapi.

2. Dampak terhadap permasalahan hukum Perseroan

Permasalahan hukum yang melibatkan Perseroan BUMN Waskita Karya (WSKT) terkait dengan kasus korupsi mantan direksi memberikan dampak signifikan yang mencakup beberapa aspek krusial. Kasus hukum ini muncul karena peran perusahaan dalam pengangkutan dan penyampaian konstruksi dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank. Fokus utama jatuh pada dampak langsung dari kasus hukum tersebut, menegaskan perlunya pengawasan hukum yang ketat dan transparansi dalam operasional perusahaan. Reputasi Perseroan WSKT terpuak oleh dampak kasus ini, membahayakan daya saingnya. Walaupun manajemen menjamin bahwa operasional dan keuangan tidak terpengaruh, reputasi dan citra perusahaan tetap terkena dampaknya. Investasi dalam Perseroan WSKT juga mengalami dampak, dengan potensi investor enggan menanamkan modalnya karena ketidakpastian seputar dampak kasus korupsi terhadap kebijakan dan keputusan perusahaan. Keberlanjutan kebijakan manajemen perusahaan menjadi sorotan, menyoroti pentingnya pengawasan hukum dan transparansi dalam merumuskan kebijakan perusahaan. Dampak juga dirasakan dalam pengadaan investor, dengan potensi penurunan minat investor karena ketidakpastian seputar kasus korupsi dan dampaknya terhadap

strategi dan kebijakan perusahaan. Secara menyeluruh, permasalahan hukum ini membawa dampak yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek vital dalam operasional dan kelangsungan Perseroan BUMN Waskita Karya.

3. Dampak terhadap kegiatan operasional Perseroan

Dampak terhadap kegiatan operasional Perseroan BUMN Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) akibat beberapa peristiwa memicu tindakan-tindakan penting dalam upaya memperbaiki situasi keuangan dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Perseroan berhasil meraih dukungan restrukturisasi dari bank BUMN dan swasta, suatu langkah yang diharapkan dapat menghidupkan kembali kondisi keuangan perusahaan. Namun, pengajuan permohonan penundaan kewajiban (PKPU) oleh Perseroan menimbulkan ketidakpastian terkait kegiatan operasional dan stabilitas keuangan. Meskipun manajemen menegaskan bahwa dampaknya tidak signifikan, kekhawatiran terhadap kebijakan manajemen dan potensi pengaruh terhadap penerimaan investor tetap menjadi perhatian utama. Selain itu, suspensi perdagangan saham oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) juga merupakan peristiwa yang memengaruhi Perseroan. Meskipun dampaknya tidak langsung terhadap kegiatan operasional, namun mencerminkan pengaruh yang signifikan terhadap nilai saham Perseroan. Secara keseluruhan, Perseroan WSKT telah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kondisi keuangan dan mengoptimalkan operasionalnya. Melalui dukungan restrukturisasi dan langkah-langkah strategis lainnya, Perseroan berusaha mengatasi dampak peristiwa-peristiwa tersebut untuk mencapai kelangsungan operasional yang lebih baik di masa mendatang.

4. Dampak terhadap kondisi keuangan Perseroan

Dampak terhadap kondisi keuangan Perseroan BUMN Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) melibatkan sejumlah faktor yang memiliki implikasi signifikan, menantang kelangsungan operasional dan keuangan perusahaan. Salah satu dampak utamanya adalah krisis likuiditas yang timbul setelah pembatalan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 3 triliun. Krisis ini berpotensi menghambat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan, menciptakan tekanan finansial yang serius. Penurunan harga saham, akibat rencana *rights issue* yang tidak sesuai harapan, juga memberikan dampak negatif pada kondisi keuangan Perseroan. Depresiasi nilai saham dapat berimbas pada pendapatan yang diharapkan dari penjualan saham tambahan kepada pemegang saham yang memegang hak tersebut. Pembatalan PMN Rp 3 triliun yang sebelumnya dianggarkan untuk Waskita Karya juga menjadi pukulan serius terhadap kondisi keuangan perusahaan. Kehilangan dukungan modal negara dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk melaksanakan rencana investasi dan membiayai proyek-proyek penting. Dampak reputasi yang timbul dari kasus korupsi mantan direksi juga turut menambah ketidakpastian dalam kondisi keuangan. Meskipun manajemen menegaskan bahwa dampaknya tidak bersifat langsung, reputasi yang tercemar dapat merugikan kepercayaan investor dan mitra bisnis, berpotensi merugikan nilai perusahaan. Keputusan untuk melakukan restrukturisasi dan evaluasi menyeluruh atas kondisi keuangan mencerminkan upaya proaktif dalam mengatasi krisis. Meskipun begitu, perlu diingat bahwa proses restrukturisasi juga dapat membawa konsekuensi, dan diperlukan manajemen sumber daya yang cerdas. Mengatasi dampak ini memerlukan tindakan strategis dan solusi terarah untuk memulihkan serta meningkatkan kondisi keuangan Perseroan BUMN Waskita Karya.

5. Dampak bagi masyarakat

Dampak bagi masyarakat akibat kondisi Perseroan BUMN Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) yang menghadapi tantangan keuangan dan hukum mencakup beberapa aspek krusial. Kesulitan finansial yang dihadapi oleh Waskita Karya sebagai salah satu aktor utama dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia berpotensi menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi masyarakat melalui penundaan atau kendala dalam penyediaan infrastruktur yang dijanjikan. Terlebih lagi, kesulitan keuangan juga membawa potensi pembatalan proyek-proyek infrastruktur, yang berdampak pada ketersediaan dan mutu layanan infrastruktur, dan berimbas pada kesejahteraan masyarakat. Para pekerja Perseroan juga menghadapi ketidakpastian, yang dapat menghasilkan dampak negatif terhadap kesejahteraan mereka dan keluarganya, menciptakan beban ekonomi dan sosial tambahan. Peran besar Waskita Karya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional melalui proyek-proyeknya menjadikan kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan dapat merembet ke perekonomian secara keseluruhan, mengurangi dampak positif yang diharapkan dari pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, kondisi keuangan dan hukum Waskita Karya bukan hanya menjadi masalah internal perusahaan, melainkan juga memiliki konsekuensi langsung terhadap masyarakat, pelaksanaan proyek infrastruktur, kesejahteraan pekerja, dan stabilitas perekonomian nasional.

Kesimpulan

Dalam era ini, isu korupsi di Indonesia terus menjadi sorotan utama di kalangan masyarakat, terutama melalui berbagai media baik lokal maupun nasional. Kasus korupsi yang melibatkan PT Waskita Karya (Persero) Tbk memiliki dampak yang signifikan dan kompleks. Terdapat tantangan serius terhadap kelangsungan usaha perusahaan, khususnya dalam konteks krisis likuiditas, penurunan harga saham, dan pembatalan penyertaan modal negara (PMN). Dampak tersebut menciptakan tekanan finansial yang serius dan mengancam proyek-proyek infrastruktur yang dijalankan oleh perusahaan. Secara hukum, perusahaan juga menghadapi resiko terkait reputasi dan citra, yang dapat mempengaruhi kepercayaan pemangku kepentingan dan minat investor. Permasalahan ini menciptakan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan manajemen dan memunculkan kebutuhan akan pengawasan hukum dan transparansi yang lebih ketat. Dalam konteks kegiatan operasional, upaya restrukturisasi dan dukungan dari perusahaan keuangan menjadi kunci dalam mengatasi dampak krisis. Meskipun demikian, pengajuan penundaan kewajiban (PKPU) dan suspensi perdagangan saham menambah kompleksitas situasi dan menciptakan ketidakpastian terkait stabilitas keuangan perusahaan. Kondisi ini memerlukan langkah-langkah strategis, termasuk restrukturisasi, evaluasi menyeluruh, dan solusi terarah untuk memulihkan dan meningkatkan kondisi keuangan perusahaan. Terakhir, dampak pada masyarakat mencakup potensi penundaan atau pembatalan proyek infrastruktur yang dapat mempengaruhi ketersediaan dan mutu layanan publik. Para pekerja perusahaan juga menghadapi ketidakpastian yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mereka dan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Saran

Berdasarkan berbagai dampak yang telah ditimbulkan dari adanya kasus korupsi PT Waskita Karya (Persero), dalam upaya untuk mengatasi dampak korupsi di PT Waskita Karya (Persero) ini memerlukan berbagai tindakan serius, baik dalam hal restrukturisasi perusahaan, pengelolaan krisis keuangan, maupun upaya untuk memulihkan reputasi. Selain itu, upaya peningkatan pengawasan internal yang lebih ketat terhadap perusahaan tersebut juga penting untuk memastikan efektivitas pencegahan dan penindakan terhadap korupsi. Adanya kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan sosialisasi Whistleblowing System (WBS) terhadap seluruh struktur perusahaan, diharapkan dapat membuat dan menguatkan perlindungan hukum untuk mencegah tindakan korupsi. Bentuk dari Whistleblowing System (WBS) dapat berupa sistem pelaporan yang memungkinkan siapa pun untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau penyimpangan. Setiap individu memiliki peran sebagai pelapor terhadap potensi kecurangan atau pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan dan melanggar norma serta etika. Diperlukan juga perlindungan terhadap pelapor, agar tidak muncul rasa takut untuk melaporkan hal-hal yang dinilai sebagai dugaan kasus pelanggaran hukum. Hal ini juga akan memberikan dampak terhadap penguatan transparansi tata kelola dan implementasi segala keputusan yang akan diberikan kepada anak perusahaan. Langkah-langkah ini tidak hanya penting bagi keberlanjutan perusahaan tetapi juga memiliki implikasi langsung pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Penting untuk memastikan adanya sanksi yang tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Proses hukum yang berlaku harus berjalan dengan cepat dan adil, serta dapat memberikan hukuman yang sebanding dengan tingkat kerugian yang disebabkan oleh tindakan korupsi.

Daftar Pustaka

- Ali Muhamad, 1993. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern. Jakarta, Pustaka Amani.
- Dirut Waskita Karya Jadi Tersangka Korupsi, Ini Kronologi dan Perannya.* (2023, May 4). Klausu.co. Retrieved December 6, 2023, from <https://klausu.co/dirut-waskita-karya-jadi-tersangka-korupsi-ini-kronologi-dan-perannya/>
- Enam Fakta Kasus Korupsi Waskita Karya yang Melibatkan Destiawan Soewardjono Cs.* (2023, May 4). Koran TEMPO. Retrieved December 6, 2023, from <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/481825/enam-fakta-kasus-korupsi-waskita-karya-yang-melibatkan-destiawan-soewardjono-cs>
- Gak Mau Kesandung Korupsi Lagi, WSKT Keluarin 'Jurus' Ini.* (2023, September 15). CNBC Indonesia. Retrieved December 6, 2023, from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230915103857-17-472715/gak-mau-kesandung-korupsi-lagi-wskt-keluarin-jurus-ini>
- Gea, A. A. (2014). Integritas personal dan kepemimpinan etis. *Humaniora*, 5(2), 950-959
- Hopkin, J. 1997. Political Parties, Political Corruption, and the Economic Theory of Democracy. *Crime, Law and Social Change* 27(3–4): 255–274
- Lestari, N. K. L., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh pengendalian internal, integritas dan asimetri informasi pada kecurangan akuntansi. *E-jurnal Akuntansi*, 389-417.
- Mauro, Paolo, 2005. *The Persistence of Corruption and Slow Economic Growth*. IMF Working Paper.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002

- Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 64
- Nasution, R. (2020). Proyek Fiktif Sebagai Modus Korupsi di Indonesia. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 2. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin/article/view/8438/3877>
Nomor : 665/WK/DIR/2023 Jakarta, 03 Mei 2023. (2023, May 2). PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Retrieved December 1, 2023, from https://investor.waskita.co.id/newsroom/2d2f0f4062_7d8f90a399.pdf
- Sukriah, I. A., & Inapty, B. A. (2009). Pengaruh pengalaman kerja, independensi, obyektifitas, integritas dan kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan. *Simposium Nasional Akuntansi XII*, Palembang, 3(2), 1-38.
- Tanzi, V. 1998. Corruption Around the World. *Imf Staff Papers* 45(4):559–594